

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Semester I Tahun Anggaran 2022



Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang,
Banten 42118

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah badan akuntansi dan pelaporan keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 30 Juni 2022
Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang
Sekretaris,

Hendro Sulisty, S. Sos., M.Si
NIP. 198210162009021005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas pos-pos laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI Lampiran	48



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No. 247 Telp. (0254) 200374, 217334. Fax. (0254) 217323 Serang 42118
e-mail . kpu_kota.serang@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Semester I Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2022
Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang
Sekretaris,

Hendro Sulisty, S. Sos., M.Si
NIP. 198210162009021005

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0.- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp 2.695.319.425 atau mencapai 99,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.719.851.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022. Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 836.417.670 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp Rp 30.000.000 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 794.855.170 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 11.562.500.

Adapun Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 247.792.010 dan Rp 588.625.660.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 1.356.008.073 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 1.356.008.073). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar

Biasa masing-masing sebesar (Rp 1.356.008.073) dan sebesar Rp (1.356.008.073). sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 1.356.008.073).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 806.417.670 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp 1.356.008.073) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1.138.216.063 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 588.625.660.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	6.035.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	6.035.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.907.229.000	972.294.797	50,98	952.028.697
Belanja Barang	B.4	843.981.000	165.921.266	19,66	408.439.873
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
Belanja Hibah	B.7	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.751.210.000	1.138.216.063	41,37	1.360.468.570

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		30.000.000	
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	2.451.563.627	2.451.563.627
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	86.750.000	86.750.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.743.458.457)	(1.743.458.457)
Jumlah Aset Tetap		794.855.170	794.855.170
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	18.500.000	18.500.000
Aset Lain-Lain	C.22	308.339.500	308.339.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(315.277.000)	(315.277.000)
Jumlah Aset Lainnya		11.562.500	11.562.500
JUMLAH ASET		836.417.670	806.417.670
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	30.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	209.076.565	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.26	8.715.445	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		247.792.010	-
JUMLAH KEWAJIBAN		247.792.010	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	588.625.660	806.417.670
JUMLAH EKUITAS		588.625.660	806.417.670
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		836.417.670	806.417.670

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.181.371.362	952.028.697
Beban Persediaan	D.3	-	11.983.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	134.178.818	341.585.703
Beban Pemeliharaan	D.5	38.287.893	84.198.002
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.170.000	7.460.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	189.920.712
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.356.008.073	1.587.176.614
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.356.008.073)	(1.587.176.614)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.11	-	-
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	6.035.000
SURPLUS/DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
Jumlah Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	6.035.000
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.356.008.073)	(1.581.141.614)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	806.417.670	1.119.857.954
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.356.008.073)	(1.581.141.614)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.138.216.063	1.354.433.570

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Komisi

Pemilihan Umum Kota Serang

Dasar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang didirikan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.
Hukum Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sedangkan Rencana Strategis diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Entitas dan Rencana Strategis

Entitas berkedudukan di Jalan Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan No 247 Ciceri Kota Serang.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang

dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan

dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu

sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tidak merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. DIPA direvisi oleh KPU RI dimana terjadi pengurangan belanja pegawai pada pos belanja pegawai. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang ada. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.907.229.000	1.907.229.000
Belanja Barang	756.548.000	843.981.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Hibah		-
Jumlah Belanja	2.663.777.000	2.751.210.000

Realisasi

Pendapatan

Rp. 6.035.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Hasil Lelang	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuan	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami penurunan 100 % dibandingkan TA 202.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	6.035.000	-100
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	-	6.035.000	(100)

Lelang logistik yang dilakukan pada tahun 2021 terjadi pada tanggal 12 bulan Januari. Berdasarkan salinan risalah lelang nomor 1/22/2021 dan nomor NTPN 9B39A48VUIF0NSNS, lelang logistik berupa surat suara ex Pilkada Kota Serang tahun 2018 dengan berat 2.158 Kg dengan harga lelang Pembeli sebesar Rp6.035.000.

Realisasi
Belanja Negara
Rp
1.138.216.063

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 1.138.216.063 atau 41,37 % dari anggaran belanja sebesar Rp 2.751.210.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.907.229.000	972.294.797	50,98
Belanja Barang	843.981.000	165.921.266	19,66
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Barang	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2.751.210.000	1.138.216.063	41,37

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 16,34% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain tidak ada belanja modal pada Ta 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

Uraian	2022		
	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	972.294.797	952.028.697	2,13
Belanja Barang	165.921.266	408.439.873	(59,38)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Barang	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	1.138.216.063	1.360.468.570	(16,34)

Belanja
Pegawai Rp.
972.294.797

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 972.294.797 dan Rp 952.028.697. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar 2,13 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

Realisasi belanja pegawai mengalami Kenaikan sebesar 2,13% dikarenakan adanya realisasi tunjangan kinerja pegawai THR dan Tunjangan Kinerja Pegawai 13 untuk 10 orang dan besaran Uang Kehormatan Pejabat THR dan 13 mengalami kenaikan.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	972.294.797	952.028.697	2,13
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			-
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi			-
Jumlah Belanja Kotor	972.294.797	952.028.697	2,13
Pengembalian Belanja Pegawai			-
Jumlah Belanja	972.294.797	952.028.697	2,13

B.4 Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp.165.921.266*

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 165.921.266 dan Rp 408.439.873.

Realisasi Belanja Barang pada TA 2022 mengalami Penurunan sebesar 59% dibandingkan TA 2021 disebabkan belanja barang mengalami penurunan pagu karena Sebagian besar anggaran untuk tahapan pemilu 2024 yang belum bisa dipergunakan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional			-
Belanja Barang Non Operasional	165.921.266	408.439.873	(59)
Jumlah Belanja Kotor	165.921.266	408.439.873	
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	165.921.266	408.439.873	(59,38)

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp 0

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	1REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp 0, Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin pada anggaran tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
			0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2022 tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan Realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0% persen dibandingkan Realisasi TA 2021.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada Realisasi karena anggaran TA 2022 tidak ada anggarannya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp
30.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 30.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara. Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Koran Per 30 Juni 2021	-	-
Kwitansi UP yang Belum di SP2Dkan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang
PNBP Rp0*

Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2022 dan 2021

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021

No	Nama	TH 2022	2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
	Jumlah	-	-

*Bagian
Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2022 dan 2021

No	Nama	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gudang Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih

Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp 0*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	-	-
Barang Persediaan Bahan Baku	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan layak digunakan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah

tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021

No	Debitur	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2022 dan 2021

No	Debitur	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang TA 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Tanah
Rp0*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Adapun terdapat perjanjian Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Serang dengan KPU Kota Serang tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Serang Nomor: 011/01-BPKAD/PR/2022 Nomor: 170/PR.01.1/3673.1/2022, pada Senin tanggal Dua Puluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bahwa Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si sebagai Pihak Kesatu dan Ade Jahran sebagai Pihak Kedua bahwa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang beralamat di Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 247 Ciceri Bunderan Kota Serang dengan luas tanah 300 m² telah dipinjamkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2022	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2021	0

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2022

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			-
2			-
3			-
4			-
Jumlah			-

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp.2.451.563.627

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp 2.451.563.627 dan Rp 2.451.563.627. Realisasi peralatan dan mesin pada Tahun anggaran 2022 tidak mengalami kenaikan dibanding dengan Tahun Anggaran 2021.

Perbandingan realisasi Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	2.451.563.627	2.451.563.627	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	2.451.563.627	2.451.563.627	0,00

Gedung dan Bangunan Rp0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Adapun terdapat perjanjian Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Serang dengan KPU Kota Serang tentang Pinjam Pakai Tanah dan

Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Serang Nomor: 011/01-BPKAD/PR/2022 Nomor: 170/PR.01.1/3673.1/2022, pada Senin tanggal Dua Puluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bahwa Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si sebagai Pihak Kesatu dan Ade Jahran sebagai Pihak Kedua bahwa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang beralamat di Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 247 Ciceri Bunderan Kota Serang dengan luas tanah 300 m² telah dipinjamkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Jalan, Irigasi dan Bangunan	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp
86.750.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp 86.750.000 dan Rp.86.750.000. Terdapat Aset tetap renovasi sebesar Rp 86.750.000.- yang berasal dari Anggaran 076 (APBN) Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Aset Tetap Lainnya	86.750.000	86.750.000	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	-	-	-
Jumlah Belanja	86.750.000	86.750.000	0,00

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(1.743.458.
457)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp(1.743.458.457) dan Rp(1.743.458.457).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Akumulasi penyusutan aset tetap	1.743.458.457	1.743.458.457	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	-	-	-
Jumlah Belanja	1.743.458.457	1.743.458.457	0,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp18.500.000 dan Rp18.500.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2022	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

Mutasi tambah:

-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2021

Uraian	Nilai Perolehan
Aset Tak Berwujud	18.500.000
	0
Jumlah	0

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp.308.339.500 dan Rp.308.339.500. Merupakan Aset yang sudah dihentikan penggunaannya

Rincian Aset Lain –Lain TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI T.A 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Aset Lain-Lain	308.339.500	308.339.500	0
	0	0	0
	0	0	0
	-	-	-
Jumlah Belanja	308.339.500	308.339.500	0

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp (315.227.000)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. (315.227.000) dan Rp. (315.227.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Penyusutan dan amortisasi asset Lainnya TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	2021	NAIK (TURUN) %
akumulasi Penyusutan dan amortisasi aset lainnya	-315.227.000	-315.227.000	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	-	-	-
Jumlah Belanja	-315.227.000	-315.227.000	0,00

Uang Muka
dari KPPN
Rp.30.000.0
00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Rincian Utang Pihak ketiga	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan diterima dimuka

Uraian	Jumlah
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0 **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TH 2022	TH 2021
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp 588.625.660 **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 588.625.660 dan Rp806.417.670 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Realisasi Ekuitas TA 2022 mengalami penurunan sebesar 27.01 %.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Ekuitas	588.625.660	806.417.670	(27,01)
		0	0,00
	0	0	0,00
	-	-	0,00
Jumlah Belanja	588.625.660	806.417.670	(27,01)

*Pendapatan
PNBP Rp.0*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Beban
Pegawai Rp.
1.181.371.362*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada tahun anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.181.371.362 dan Rp. 952.028.697. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	1.181.371.362	952.028.697	24,09
Jumlah	1.181.371.362	952.028.697	24,09

*Beban
Persediaan
Rp.0*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.11.983.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	11.983.500	-100
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	0
Jumlah	-	11.983.500	0,00

Beban Barang dan Jasa Rp 134.178.818

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp.134.178.818. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang operasional penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp 22.830.873 pembelian berupa paket daya tahan tubuh (madu, masker, hand sanitizer, vitamin, susu beruang). Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022
Beban Keperluan Perkantoran	19.506.300
Beban Pengiriman Surat Dinas pos surat	64.000
Beban Honor Operasional Satker	37.300.000
Beban Barang Operasional Lainnya	23.050.000
Beban Bahan	2.797.500
Beban Honor Output Kegiatan	1.500.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000
Beban Barang Non Operasional (Penanganan Pandemi Covid-19)	0
Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	22.830.873
Beban Langganan Listrik	19.966.136
Beban Langganan Telepon	5.863.697
Beban Sewa	0
Beban Jasa Profesi	0
Beban Jasa Lainnya	300.312
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan N	0
Jumlah	134.178.818

Beban Pemeliharaan Rp.38.287.893

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp.38.287.893. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.188.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.099.893
Beban Pemeliharaan Lainnya	
Jumlah	38.287.893

Beban Perjalanan Dinas Rp.2.170.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.170.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban

Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	2.170.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
Jumlah	2.170.000

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada Tahun 2021. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp.0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah Penyusutan	-
Beban Amortisasi Software	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-
Jumlah Amortisasi	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar yang didalamnya terdapat pendapatan dari peindahtanganan BMN Lainnya. Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6.035.000	0,00
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	0		-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	6.035.000	0,00

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.806.417.670

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp806.417.670 dan Rp1.119.857.954.

Defisit LO
Rp.
(1.356.008.073)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.(1.356.008.073) dan Rp.(1.581.141.614). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada lelang Kotak Suara. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Kotak Suara	-
Jumlah	-

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir

pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp.1.138.216.063

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.138.216.063 dan Rp.1.354.433.570. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) dan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 30 Juni 2022 dan 2021, DDEL sebesar Rp 0 dan Rp 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 0 dan Rp 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Tidak ada pengesahan pengembalian hibah langsung yang merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2019.

Ekuitas Akhir

Rp

588.625.660

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.588.625.660 dan Rp. 893.149.910.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting di KPU Kota Serang.

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 670714 **KPU KOTA SERANG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 22/07/22 2:44 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 22/07/22 2:53 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,181,371,362	952,028,697	229,342,665	24.09
Beban Persediaan	0	11,983,500	(11,983,500)	(100)
Beban Barang dan Jasa	134,178,818	341,585,703	(207,406,885)	(60.719)
Beban Pemeliharaan	38,287,893	84,198,002	(45,910,109)	(54.526)
Beban Perjalanan Dinas	2,170,000	7,460,000	(5,290,000)	(70.912)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 670714 **KPU KOTA SERANG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 22/07/22 2:44 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 22/07/22 2:53 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	189,920,712	(189,920,712)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,356,008,073	1,587,176,614	(231,168,541)	(14.565)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,356,008,073)	(1,587,176,614)	231,168,541	(14.565)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	6,035,000	(6,035,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	6,035,000	(6,035,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	6,035,000	(6,035,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,356,008,073)	(1,581,141,614)	225,133,541	(14.239)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,356,008,073)	(1,581,141,614)	225,133,541	(14.239)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA SERANG 670714

Waktu Olap: 2022-07-22 02:51:26.0 [B@14a2d0d6
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 22/07/22 2:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0	0	6,035,000	(6,035,000)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0	0	6,035,000	(6,035,000)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	1,907,229,000	972,294,797	934,934,203	51	1,815,393,000	952,028,697	863,364,303	52
	BELANJA BARANG	843,981,000	165,921,266	678,059,734	20	714,639,000	408,439,873	306,199,127	57
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	2,751,210,000	1,138,216,063	1,612,993,937	41	2,530,032,000	1,360,468,570	1,169,563,430	54
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 670714 **KPU KOTA SERANG**

Tgl Data : 22/07/22 2:53 AM
 Kode Lap : LPE.SATKER
 Tanggal : 22/07/22 2:49 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	806,417,670	1,119,857,954	(313,440,284)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,356,008,073)	(1,581,141,614)	225,133,541	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,138,216,063	1,354,433,570	(216,217,507)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(217,792,010)	(226,708,044)	8,916,034	-
EKUITAS AKHIR	588,625,660	893,149,910	(304,524,250)	-

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 670714

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
BANTEN
KPU KOTA SERANG

Tgl Data 22/07/22 2:52 AM

Tgl. Cetak 22/07/2022 2:54 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	435,559,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	32,791,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	11,849,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	31,874,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	7,020,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	30,809,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	91,085,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	13,410,000
2.0	511332	Allotment Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	768,495,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	484,327,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	31,500,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	500,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	600,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	86,900,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	23,050,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	50,000,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	69,821,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	96,600,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	108,941,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	950,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	6,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	41,557,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	13,200,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	500,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	18,000,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	18,000,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	55,800,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	74,863,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	132,199,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	15,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	233,283,840	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,388	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	16,649,052	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	6,308,822	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,700,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	740,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 670714

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
BANTEN
KPU KOTA SERANG

Tgl Data 22/07/22 2:52 AM

Tgl. Cetak 22/07/2022 2:54 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,780,000	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	16,366,920	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	35,113,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,770,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	401,365,250	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	231,693,525	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	19,089,900	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	64,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	37,300,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,050,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14,646,828	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,682,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	19,966,136	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,863,697	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	300,312	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,188,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,099,893	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,170,000	0
JUMLAH			1,138,956,063	2,751,950,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 670714

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
BANTEN
KPU KOTA SERANG

Tgl Data 22/07/22 2:45 AM

Tgl. Cetak 22/07/2022 2:53 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker-SAKTI

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	0	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,451,563,627	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	86,750,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,743,458,457
0.0	162151	Software	18,500,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	308,339,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	308,339,500
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,937,500
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	209,076,565
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	8,715,445
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,138,216,063
0.0	391111	Ekuitas	0	806,417,670
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	296,449,640	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,610	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	21,042,512	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	7,963,030	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	27,540,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	740,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,860,000	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	20,712,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	35,113,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,250,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	507,155,500	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	252,019,950	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	19,506,300	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	64,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37,300,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	23,050,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22,830,873	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,797,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 670714

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
BANTEN
KPU KOTA SERANG

Tgl Data 22/07/22 2:45 AM

Tgl. Cetak 22/07/2022 2:53 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker-SAKTI

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	19,966,136	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,863,697	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	300,312	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,188,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,099,893	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,170,000	0
JUMLAH			4,251,901,200	4,251,901,200



**SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEMERINTAH KOTA SERANG**

NOMOR : 011/01-BPKAD/PR/2022

NOMOR : 170/PR.01.1/3673.1/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-06-2022)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 DRS. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Serang, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru (KSB), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2 ADE JAHRAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang beralamat di Jalan Fatah Hasan Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Serang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Dasar Pelaksanaan

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - (6) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 12) ;
 - (7) Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 094/RT.073673.1/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ;
 - (8) Keputusan Walikota Serang Nomor : 031/Kep.52-Huk/2010 Tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Serang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian ini untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Serang yang berada di Jalan Fatah Hasan Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam rangka menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Pasal 3

Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang milik daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kantor melalui mekanisme Pinjam Pakai kepada **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut :

NO	Jenis BMD	Luas Tanah	Luas Bangunan	Kode Barang/ID Barang/ID Awal
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300 m2	-	1.3.1.01.01.04.001/5284371/ 43004167

2	Bangunan Gedung Kantor Permanen		-	1.3.3.01.01.01.001/7057672/4354970
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen			1.3.3.01.01.01.001/7057697/5144217

untuk dipergunakan sebagai Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan merubah, memindah tangankan atau mengalih fungsikan Barang Milik Daerah dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memelihara atas Barang Milik Daerah tersebut dan ;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga keutuhan dan keamanan dengan baik serta bertanggung jawab penggunaan Barang Milik Daerah tersebut kepada Pemerintah Kota Serang.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu pinjam Tanah dan Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Serang dimaksud berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan waktu pinjam pakai dimaksud, **PIHAK KEDUA** membuat surat permohonan perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum 2 (dua) bulan masa perjanjian akan berakhir.
- (3) Apabila masa perjanjian telah berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak memakai lagi, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.
- (4) Perpanjangan dan perubahan atas Surat Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk addendum.

Pasal 5 **Lain - lainnya**

- (1) Hal-hal yang belum tercakup atau adanya perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian yang tidak terlepas dari surat perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini batal apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dan peraturan yang telah disepakati.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian ini, apabila ada permasalahan yang timbul diluar kemampuan dari **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat guna memperoleh penyelesaian yang mendukung kegiatan perjanjian ini.
- (4) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan

diberikan cap/stempel **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG



DRS. H. NANANG SAEFUDIN, MSi
NIP. 19670802 198603 1 003



**Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
antara
Pemerintah Kota Serang
Dengan
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor : 030/17-BPKAD/BAST/2022
Nomor : 176/PR.01.1/3673.1/2022**



Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06- 2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Nama : **DRS. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Serang
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Serang Baru (KSB) Kota Serang
Provinsi Banten.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- (2) Nama : **ADE JAHRAN**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
Alamat : Jalan Fatah Hasah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung Kantor Pemerintah Kota Serang untuk digunakan sebagai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Negara ini dilakukan dalam rangka Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kota Serang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang.

Pasal 2

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung Kantor melalui mekanisme Pinjam Pakai yang beralamat di Jalan Fatah Hasan Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut :

NO	Jenis BMD	Luas Tanah	Luas Bangunan	Kode Barang/ID Barang/ID Awal
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300 m2	-	1.3.1.01.01.04.001/5284371/43004167
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen		-	1.3.3.01.01.01.001/7057672/4354970
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen			1.3.3.01.01.01.001/7057697/5144217

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



ADE JAHRAN

PIHAK KESATU



DRS. H NANANG SAEFUDIN, M.Si